

ANALISIS GINI RATIO DAN KONSUMSI RUMAH TANGGA 2017



Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Gunung Mas

kerjasama dengan



***BADAN PUSAT STATISIK
KABUPATEN GUNUNG MAS***

ANALISIS GINI RATIO DAN KONSUMSI RUMAH TANGGA 2017

ANALISIS GINI RATIO DAN KONSUMSI RUMAH TANGGA 2017

ISBN :
Ukuran Buku : 21,5 cm x 16 cm
Jumlah Halaman : iv + 37

Naskah :
Citra Nugroho, SP
Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Gunung Mas

Tim Penyusun :
Penanggung Jawab : Drs. Waras
Koordinator : Citra Nugroho, SP
Anggota : Elisamarta Rotua Sibagariang, SST

Gambar Kulit :
Citra Nugroho, SP
Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Gunung Mas

Diterbitkan oleh :
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Gunung Mas
dan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

“Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya”

KATA PENGANTAR

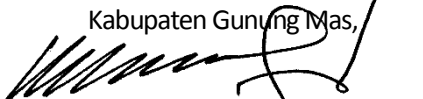
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata seringkali menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat dan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah. Kondisi ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Untuk kepentingan perencanaan pembangunan maka informasi ini menjadi penting, hal ini berkaitan dengan pola intervensi yang harus dilakukan untuk mengurangi gap kesejahteraan.

Melalui publikasi ini diuraikan ketimpangan pendapatan penduduk dan distribusi pendapatan penduduk dengan menggunakan alat ukur Koefisien Gini dan Ukuran Bank Dunia.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya publikasi ini.

Kuala Kurun, September 2017

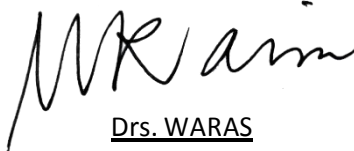
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Gunung Mas,



Drs. DIHEL, M.Si

NIP. 19690820 199403 1 019

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Gunung Mas,



Drs. WARAS

NIP. 19651212 199303 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penghitungan Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan ...	5
1.3. Sumber Data	6
1.4. Metodologi Pengukuran Tingkat Pemerataan	8
1.5. Kriteria Bank Dunia	8
1.6. Gini Ratio	10
BAB II DISTRIBUSI PENDAPATAN	12
2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan	12
2.2. Proporsi Pendapatan	14
BAB III ANALISIS GINI RATIO DAN KONSUMSI RUMAH TANGGA KABUPATEN GUNUNG MAS	16
3.1. Analisis Gini Ratio	16
3.1.1. Gini Ratio Antar Lapangan Usaha	17
3.1.2. Gini Ratio Antar Pendidikan	18
3.1.3. Gini Ratio Antar Status Pekerjaan	18
3.2. Distribusi Pendapatan Penduduk	19
3.3. Konsumsi Rumah Tangga	20
BAB IV PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Gunung Mas, 2015-2016	22
Tabel 2	Gini Ratio Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016	28
Tabel 3	Gini Ratio Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2016	29
Tabel 4	Gini Ratio Menurut Tipe Daerah Tahun 2016	30
Tabel 5	Gini Ratio Penduduk 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Status Pekerjaan Dari Lapangan Usaha Utama Tahun 2016.....	31
Tabel 6	Distribusi Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia	32
Tabel 7	Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Perkotaan	34
Tabel 8	Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Perdesaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016	35
Tabel 9	Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016	36
Tabel 10	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016	37

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Komposisi Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015-2016	23
Gambar 2	Kurva Lorentz Gini Ratio Tahun 2016	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong stabilitas, dan meningkatkan potensi daerah secara terpadu.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu gambaran pembangunan diberbagai sektor ekonomi, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi tingkat ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Adapun ketimpangan ekonomi yang dimaksud adalah ketimpangan pendapatan yang merupakan suatu keadaan dimana distribusi pendapatan masyarakat menunjukkan keadaan yang tidak merata dan lebih menguntungkan kelompok tertentu.

Strategi pembangunan ekonomi suatu daerah pada umumnya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pengukuran pertumbuhan ekonomi yang umum digunakan adalah Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB ini merupakan gambaran dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi pada suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekonomi mensyaratkan PDRB yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada skala regional.

Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melakukan dan yang berhak menikmati hasil-hasilnya; kalangan elit kaya raya yang minoritas atautkah mayoritas rakyat yang miskin. Pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberikan manfaat yang berarti bagi anggota masyarakat yang paling miskin dan paling membutuhkan perbaikan taraf hidup. Dengan kata lain pembangunan akan dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pendistribusian pendapatan (*income distribution*) yang merata pada seluruh lapisan masyarakat. Fenomena ketimpangan distribusi pendapatan masih merupakan persoalan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara berkembang diseluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam skala yang lebih kecil, persoalan ini juga dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Kabupaten Gunung Mas yang sedang membangun dalam kerangka otonomi daerah, merasakan pentingnya percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pemerataan hasil-hasil pembangunan pada seluruh lapisan masyarakat diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi angka pengangguran dan mempersempit tingkat kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk. Karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun “pondasi” perencanaan yang kokoh yang bermuara pada kepentingan rakyat pada umumnya, dan khususnya pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara berkala hasil-hasil pembangunan tersebut harus dievaluasi apakah sasaran dari pembangunan tersebut dapat dicapai. Untuk itu tentunya harus didukung oleh data dan informasi yang lengkap, akurat, terpercaya dan *up to date*.

Dalam tugasnya melakukan kegiatan perstatistikan di berbagai bidang, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunung Mas bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian bertanggung jawab atas ketersediaan data dan informasi yang berkesinambungan guna perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu data yang sangat penting dan berguna dalam rangka perencanaan pembangunan tersebut adalah Gini Ratio (*Koefisien Gini*) yang menggambarkan tingkat ketimpangan

pendapatan antarpenduduk dan Distribusi Pendapatan menurut kriteria Bank Dunia (*World Bank Criteria*). Kebutuhan data sosial ekonomi, khususnya mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat perlu dipenuhi untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Dari survei-survei dengan obyek rumah tangga yang dilakukan BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei yang mempunyai cakupan data sosial paling luas. Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut kependudukan, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, sosial budaya, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan dan lingkungan, serta konsumsi dan pengeluaran.

Setiap wilayah baik negara, provinsi maupun kabupaten/kota yang melakukan pembangunan pada akhirnya akan menuju pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi lebih berarti jika diikuti pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Berbagai kebijakan ekonomi untuk peningkatan produksi akan lebih berarti jika manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu orientasi pemerataan hasil-hasil pembangunan seharusnya menjadi muara dari seluruh kegiatan perekonomian suatu daerah.

Salah satu keluhan pembanguan yang sering dibicarakan bahkan terasakan sampai lapis bawah adalah bahwa hasil-hasil

pembangunan tidak bisa ternikmati secara merata, antara desa dan kota, antar daerah, antar sektor dan antar golongan pendapatan. Hal inilah yang biasa disebut ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, dan lebih lanjut kalau tidak dicegah secara cermat akan mengarah kepada keangkuhan dan menimbulkan kecemburuan sosial.

Dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan sosial ekonomi yang terjadi selama ini, banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa penanggulangan ketimpangan pendapatan ini tidak saja penting dan perlu ditinjau dari sudut pertimbangan moral, tetapi mendesak pula untuk ditinjau dari ancaman ketegangan sosial atau kecemburuan sosial yang terselubung didalamnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali dibarengi kenaikan atau membesarnya tingkat ketimpangan pendapatan (semakin tidak merata). Pertumbuhan ekonomi yang pesat bukan saja membawa ketimpangan pendapatan yang tinggi tetapi juga menimbulkan kemiskinan pada sebagian penduduk.

1.2. Tujuan Penghitungan Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan

Penghitungan Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan (menurut kriteria Bank Dunia) penduduk Kabupaten Gunung Mas adalah untuk mendapatkan data/informasi tentang besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat dan tingkat pemerataannya pada tahun 2016. Untuk memperoleh informasi yang lebih detail, dihitung pula Gini

Ratio penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, jenis lapangan usaha utama dan status pekerjaan pada lapangan usaha utama. Informasi ini sangat dibutuhkan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemerataan pendapatan pada masing-masing sektor ekonomi dan tingkatan pendidikan terutama pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja

1.3. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan Analisis Gini Ratio dan Konsumsi Rumah Tangga 2017 adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Gunung Mas. SUSENAS secara rinci mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan rumah tangga dan anggota rumah tangga (individu) dan pengeluaran makanan dan non makanan rumah tangga sedangkan SAKERNAS mengumpulkan data dan informasi ketenagakerjaan nasional yang antara lain bersisi jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, pendidikan dan status pekerjaan utama.

Permasalahan yang timbul adalah sampai seberapa jauh tingkat kelengkapan dan keakuratan data yang dikumpulkan. Dalam penghitungan gini Ratio dan konsumsi rumah tangga, idealnya adalah menggunakan data pendapatan, namun karena keraguan terhadap

data pendapatan yang dikumpulkan sebagai akibat dari sulitnya mendapatkan informasi pendapatan yang lengkap dari responden, menyebabkan data pengeluaran lebih banyak dipakai.

Data pengeluaran dipakai sebagai **proksi** untuk memperoleh data pendapatan. Meskipun pada kenyataannya data pengeluaran masih mengandung beberapa keterbatasan, antara lain kurang terekamnya pengeluaran konsumsi di luar rumah dan kurang mencakup kelompok lapisan atas. Namun data pengeluaran yang dikumpulkan ini masih relatif lebih mendekati keadaan sebenarnya dibandingkan dengan data pendapatan.

Penggunaan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan sering menimbulkan perdebatan. Permasalahan yang sering timbul adalah :

(i) kebiasaan seseorang/rumah tangga yang selalu memenuhi kebutuhan konsumsinya dengan sistem utang sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak mencerminkan pendapatan rumah tangga yang sesungguhnya,

(ii) pada suatu level tertentu konsumsi seseorang/rumah tangga kemungkinan tidak banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga apabila data ini digunakan untuk membandingkan tingkat perubahan pemerataan pendapatan dari waktu ke waktu hampir tidak berubah. Namun demikian bagi negara-negara

berkembang seperti Indonesia yang belum memiliki sistem data base yang lengkap, data Susenas ini dirasakan adalah yang paling mendekati kondisi sosial ekonomi masyarakat.

1.4. Metodologi Pengukuran Tingkat Pemerataan

Dari berbagai studi yang dilakukan oleh para ahli mengenai pemerataan pendapatan penduduk, ditemui berbagai macam metode untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Mulai dari metode statistik yang sederhana (seperti range, standar deviasi, indeks bowley, koefisien variasi, dan lain sebagainya) sampai pada metode empiris (seperti indeks Theil, indeks Oshima, indeks Kuznet, kurva Lorenz dan sebagainya). Namun diantara metode-metode tersebut di atas, ada dua metode yang populer digunakan baik di Indonesia maupun di beberapa negara, yaitu ukuran kriteria Bank Dunia dan Koefisien Gini (Gini Ratio).

1.5. Kriteria Bank Dunia

Ukuran ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia cukup sederhana dan mudah penghitungannya, yaitu berdasarkan pangsa pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Penduduk diurutkan menurut besarnya pendapatan yang diterima dari yang terendah ke yang tertinggi. Pangsa pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk

lapis rendah ini yang akan menjadi patokan ukuran ketimpangan pendapatan.

Bank dunia membagi penduduk atas tiga kelompok yaitu, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pembagian pendapatan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpenghasilan rendah dengan ketentuan :

- a. Tingkat ketimpangan digolongkan tinggi , apabila penduduk kelompok rendah menerima lebih kecil dari 12 persen jumlah pendapatan.
- b. Tingkat ketimpangan digolongkan sedang, apabila penduduk kelompok rendah menerima antara 12-17 persen jumlah pendapatan.
- c. Tingkat ketimpangan digolongkan rendah, apabila penduduk kelompok rendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.

Pengelompokkan seperti ini sama dengan menggunakan cara desil (*decile*) yaitu 40 persen pertama sama dengan decile ke-4; 40 persen kedua sama dengan decile ke-8 dan 20 persen terakhir adalah decile ke-10.

Dalam menentukan besarnya decile ke-i digunakan rumus :

$$Di = Qb + \frac{ni - Pi}{Pa - Pb} (Qa - Qb)$$

Dimana :

i = 1,2,3,...,10

ni = Persentase ke-i

Di = Decile ke-i

Qb = Persen kumulatif dari kelas pendapatan sebelum Di

Qa = Persen kumulatif dari kelas pendapatan sesudah Di

Pa = Persen kumulatif dari jumlah penduduk sebelum Di

Pb = Persen kumulatif dari jumlah penduduk sesudah Di

1.6. Gini Ratio

Formula yang digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dari koefisien gini atau Gini Ratio (GR) adalah :

$$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

dimana : G = GR (Gini Ratio)

P = Persentase penduduk

Q = Persentase kumulatif pengeluaran

Nilai Gini Ratio berada antara 0 dan 1. Bila nilai GR bergerak mendekati 0 (nol) berarti tingkat pemerataan bertambah baik atau tingkat ketimpangan yang terjadi rendah, dan apabila nilai GR bergerak mendekati 1 (satu) berarti tingkat ketimpangan yang terjadi tinggi.

Ketimpangan pendapatan berdasarkan nilai Gini Ratio menurut Oshima sebagai berikut:

- a. Tingkat ketimpangan pendapatan dikatakan rendah apabila nilai GR antara 0 – 0,3
- b. Tingkat ketimpangan pendapatan kategori sedang apabila nilai GR antara 0,3 – 0,5
- c. Tingkat ketimpangan pendapatan tinggi apabila nilai GR lebih besar dari 0,5

BAB II

DISTRIBUSI PENDAPATAN

2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan

Proses pembangunan ekonomi selalu dihadapkan pada permasalahan antara lain tentang pertumbuhan yang dinyatakan dalam tingginya tingkat pertumbuhan per kapita, keseimbangan dalam struktur ekonomi, serta pemerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan dua masalah yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Di satu sisi ada pendapat yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan pemerataan pendapatan saling bertentangan dan berseberangan, tidak mudah dipertemukan dan bahkan pertumbuhan yang tinggi cenderung meningkatkan kesenjangan pendapatan dan sebaliknya jika kesenjangan akan dikurangi maka pertumbuhan menjadi relatif rendah. Dilain pihak ada pendapat yang sebaliknya

Sebagian besar pakar ekonomi merasa khawatir bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi malah mempertegas ketimpangan distribusi pendapatan dan memanasnya suhu perekonomian suatu wilayah. Perlawanan/pertentangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan memang sering kali menjadi bahan diskusi para ekonom, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di kawasan

asia bahkan seluruh dunia. Namun pada kenyataannya permasalahan ini belum terselesaikan sampai sekarang.

Para pengambil kebijakan di bidang ekonomi dengan diselimuti slogan politik, biasanya mendahulukan pertumbuhan ekonomi dari pada pemerataan pendapatan. Hal ini wajar karena sebelum pemerataan harus ada “pertumbuhan” lebih dahulu, walaupun pada akhirnya setelah pertumbuhan terjadi, pemerataan yang didambakan masyarakat pada umumnya tak kunjung dinikmati. Kesemuanya ini terjadi karena sistem yang digunakan adalah *trickle down effect* bukan “guyuran” *down effect*.

Dalam kerangka otonomi daerah dewasa ini, kebijakan terhadap pembangunan ekonomi termasuk didalamnya pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi menjadi tanggung jawab para pengambil kebijakan di daerah. Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah agar rantai birokrasi terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih pendek. Dengan demikian pemerintah daerah dengan wewenang yang dimiliki dapat lebih terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, sekaligus dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan tersebut.

2.2. Proporsi Pendapatan

Distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat idealnya harus merata. Menurut Kuznet, distribusi pendapatan dikatakan betul-betul merata apabila setiap kelompok rumah tangga atau penduduk dalam setiap desil proporsi pendapatannya harus sama dengan $1/10$ (10 persen). Hal ini berarti bahwa mereka yang menerima 10 persen pendapatan paling bawah jumlahnya kira-kira sama dengan 10 persen jumlah penduduk; yang menerima pendapatan 20 persen paling bawah jumlahnya sama dengan 20 persen jumlah penduduk, dan begitu seterusnya.

Namun pada kenyataannya tidaklah semudah itu diterapkan pada suatu wilayah. Kesenjangan distribusi pendapatan untuk kelompok tertentu masih ada. Hal ini salah satunya disebabkan oleh monopoli pada berbagai bidang usaha oleh sekelompok orang yang memiliki modal besar, sehingga kelompok ini mendominasi pendapatan, sementara kelompok dengan pendapatan rendah akan semakin memperoleh proporsi yang lebih kecil. Sering kali kelompok dengan pendapatan rendah ini tidak merasakan adanya ketimpangan karena merasa pendapatan mereka secara absolut meningkat dari waktu ke waktu, namun kenyataannya apabila dihitung menurut porsi pendapatan yang mereka terima terhadap total pendapatan disuatu

daerah, justru mengalami penurunan atau dengan kata lain ketimpangan pendapatan makin melebar.

BAB III

ANALISIS GINI RATIO DAN KONSUMSI RUMAH TANGGA KABUPATEN GUNUNG MAS

3.1. Analisis Gini Ratio

Gini Ratio (GR) dan konsumsi rumah tangga kriteria Bank Dunia ini dihitung berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016. Data tersebut disajikan menurut berbagai karakteristik kegiatan usaha penduduk, yaitu :

- GR menurut total penduduk
- GR menurut lapangan usaha utama
- GR menurut pendidikan
- GR menurut status pekerjaan utama

Secara umum tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas relatif rendah, atau dengan kata lain pembagian pendapatan yang diterima penduduk cukup merata. Hal ini tergambar dari GR Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2016 sebesar 0,26969 (tabel 4). Pelaksanaan pemekaran wilayah yang menjadikan Gunung Mas sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Kalimantan Tengah memberi dampak yang cukup positif bagi penduduk di daerah ini. Ditambah lagi dengan pelaksanaan otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah lebih terfokus dalam menentukan arah pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Gunung Mas yang telah dan sedang dilaksanakan telah berada pada jalur yang cukup baik.

GR penduduk umur 10 tahun ke atas yang bekerja relatif rendah, yaitu sebesar 0,26186. Artinya bahwa tingkat ketimpangan pendapatan untuk penduduk yang bekerja tergolong rendah, atau pembagian pendapatan penduduk untuk kelompok ini cukup merata.

3.1.1. Gini Ratio Antar Lapangan Usaha

Tingkat ketimpangan pendapatan pada masing-masing lapangan usaha menurut kriteria Oshima masih tergolong rendah. Hal ini terlihat pada tabel 4, dimana GR pada setiap lapangan usaha berada pada interval 0 – 0,3. Tiga sektor dengan GR terendah adalah sektor keuangan dan asuransi (0,0169), sektor Transportasi, pergudangan, informasi, dan komunikasi (0,05620), dan sektor industri pengolahan (0,11600). Namun demikian, rendahnya GR pada ketiga sektor tersebut belum secara mutlak menggambarkan keadaan penduduk Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan.

GR tertinggi adalah sektor Jasa (0,28434) diikuti oleh sektor lainnya (0,27955) dan sektor Perdagangan, hotel dan rumah makan dengan nilai GR sebesar 0,26013. Walaupun ketiga sektor ini memiliki GR tertinggi namun masih tergolong rendah apabila merujuk pada kriteria Oshima.

3.1.2. Gini Ratio Antar Pendidikan

Pembagian pendapatan menurut angka GR untuk penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja dengan latar belakang pendidikan yang berbeda sangat bervariasi. Namun demikian angka GR ini masih tergolong rendah menurut Oshima untuk seluruh latar belakang pendidikan. Artinya bahwa tingkat ketimpangan pendapatannya masih di bawah 0,3.

Bila ditinjau menurut besar kecilnya angka GR maka dua jenis golongan pendidikan dengan GR yang paling rendah adalah SMP sederajat dengan angka GR sebesar 0,19979. Rendahnya GR pada latar belakang pendidikan ini menunjukkan upah yang diterima relatif merata. Sedangkan GR terbesar adalah penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan tamat Universitas (0,28726) dan penduduk dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat (0,25418). Menarik untuk diamati adalah terdapat kecenderungan makin tinggi pendidikan yang ditamatkan, nilai GR makin tinggi.

3.1.3. Gini Ratio Antar Status Pekerjaan

Tabel 5 memperlihatkan komposisi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama secara umum ketimpangan pendapatan masih relatif rendah karena secara keseluruhan masih di bawah 0,3. Nilai GR terendah adalah pada status Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (0,22657) dan

yang tertinggi adalah pada status buruh/karyawan/pegawai (0,29667). GR pada status buruh/karyawan/pegawai relatif lebih tinggi dibandingkan terhadap status pekerjaan lainnya. Hal ini karena status buruh/karyawan/pegawai ini memang cenderung memiliki upah yang berbeda-beda bahkan antara batas bawah dengan batas atas bias sangat jauh. Contoh jenis pekerjaan ini adalah buruh honorer dibanding dengan pegawai tetap, atau upah bulanan penjaga kantor dengan gaji/tunjangan anggota dewan.

3.2. Distribusi Pendapatan Penduduk

Pada tabel 6 disajikan distribusi pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia pada tahun 2016 menurut total penduduk dan pekerja. Pada total penduduk, terlihat bahwa kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah (masyarakat lapis bawah) menyerap sebanyak 23,51 persen dari total pendapatan, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan menengah mendapat 39,59 persen dan kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi mendapat 36,89 persen. Apabila diumpamakan dengan pembagian 100 potong kue, maka pembagian kue adalah 40 orang berpenghasilan terendah hanya mendapat 23 potong kue, 40 orang berpenghasilan menengah mendapat 40 potong kue dan 20 orang dengan penghasilan tertinggi mendapat 37 potong kue. Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di Gunung Mas tahun 2016 masih kurang

merata, terutama bila dibandingkan antara penduduk kelompok berpenghasilan rendah dan penduduk kelompok berpenghasilan tinggi. Hal ini terbukti dimana lebih dari separoh hasil-hasil pembangunan (76%) dinikmati oleh penduduk pada kelompok berpenghasilan menengah ke atas.

Pertanian merupakan lapangan usaha yang menjadi pilihan sebagian besar penduduk di Kabupaten Gunung Mas. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang masih sangat luas seperti perkebunan karet dan pertanian tanaman bahan makanan. Sekitar 54 persen penduduk umur 10 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian. Karena itu menarik untuk dilihat distribusi pendapatan penduduk yang bekerja pada sektor ini.

3.3. Konsumsi Rumah Tangga

Secara makro ekonomi pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki peranan penting dalam suatu perekonomian. Hal ini dikarenakan pertama, konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Di kebanyakan negara pengeluaran konsumsi sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional.

Kedua, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan

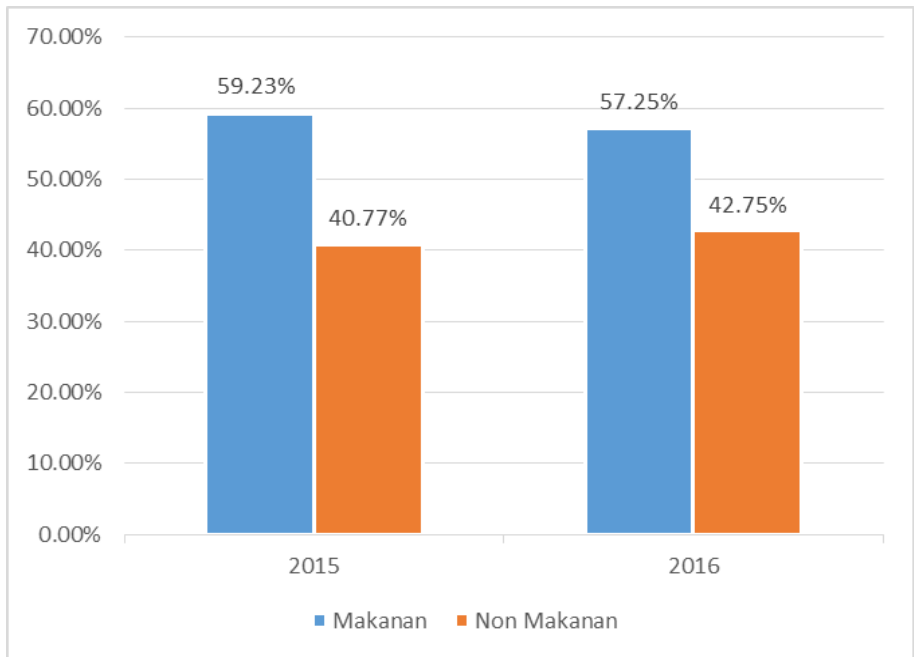
pendapatannya. (Sukirno, 2003). Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 1 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Gunung Mas, 2015-2016

Jenis Pengeluaran/Konsumsi	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Padi-padian	90,179	88,958
Umbi-umbian	6,253	4,263
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	86,799	68,146
Daging	64,718	53,336
Telur dan susu	33,386	32,008
Sayur-sayuran	52,181	45,271
Kacang-kacangan	7,686	7,961
Buah-buahan	29,887	18,304
Minyak dan kelapa	13,863	13,701
Bahan minuman	25,140	27,361
Bumbu-bumbuan	20,825	17,873
Konsumsi lainnya	16,112	16,240
Makanan dan minuman jadi	112,474	106,377
Rokok	74,870	86,109
Sub Total Makanan	634,374	585,910
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	281,968	271,347
Aneka Barang dan Jasa	83,224	83,820
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	17,711	18,193
Barang Tahan Lama	28,813	37,019
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	12,006	14,574
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	12,985	12,544
Sub Total Non Makanan	436,706	437,497
Total	1,071,080	1,023,407

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas

Gambar 1 Komposisi Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015-2016



Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas

Bila melihat komposisi pola konsumsi masyarakat Kabupaten Gunung Mas tahun 2015 – 2016 terlihat bahwa pengeluaran konsumsi untuk makanan bergeser dari 59,23 persen menjadi 57,25 persen dan konsumsi non makanan bergeser dari 40,77 persen menjadi 42,75 persen, secara teoritis komposisi pola konsumsi dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun yang harus diperhatikan, perlu dilakukan kajian

lebih mendalam terkait hal ini. Hal ini karena kondisi diatas merupakan asumsi dan teori berdasarkan data dan kondisi di masa lalu.

Pergeseran pola konsumsi penduduk Gunung Mas menimbulkan sebuah kekhawatiran, khususnya dari segi kesehatan. Pada Tabel 1 terlihat secara persentase pengeluaran makanan yang meningkat dan menjadi perhatian bagi kesehatan masyarakat adalah komoditi rokok. Komoditi terakhir ini yang cukup mengkhawatirkan bila terus dibiarkan dalam jangka panjang. Sementara disisi golongan pengeluaran untuk non makanan, terlihat penurunan pengeluaran hanya terjadi pada jenis komoditi Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri.

BAB IV

PENUTUP

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut harus dibarengi dengan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena sering terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pemerataan pembagian “kue” pembangunan. Sehingga bagi kelompok yang berpenghasilan tinggi akan semakin kaya dan yang berpenghasilan rendah akan semakin miskin yang berdampak pada kesenjangan sosial.

Untuk mengukur itu semua, penghitungan distribusi pendapatan dan Gini Ratio sangat diperlukan. Dari analisis gini ratio dan konsumsi rumah tangga Kabupaten Gunung Mas tahun 2016, digambarkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan pendapatan penduduk tergolong rendah apabila merujuk pada kriteria Oshima. Hal ini terbukti dengan angka GR yang hampir seluruhnya dibawah 0,3, baik untuk total penduduk, maupun antar lapangan usaha, pendidikan dan status pekerjaan. Namun menurut kriteria Bank Dunia, distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Gunung Mas tahun 2016 belum terbagi secara merata. Hal ini terlihat dengan masih relatif besarnya

distribusi pendapatan pada penduduk dengan kelompok berpenghasilan tinggi.

LAMPIRAN

Tabel 2 Gini Ratio Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016

Penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha	Gini Ratio
Pertanian	0.21624
Pertambangan dan Penggalian	0.24694
Industri Pengolahan	0.11600
Konstruksi/bangunan	0.19208
Perdagangan, hotel dan rumah makan	0.26013
Transportasi, pergudangan, informasi, dan komunikasi	0.05620
Keuangan dan asuransi	0.01659
Jasa	0.28434
Lainnya	0.27955
Total	0.26186

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas

Tabel 3 Gini Ratio Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2016

Penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja menurut ijazah tertinggi	Gini Ratio
SD ke bawah	0.24260
SMP sederajat	0.19979
SMA sederajat	0.25418
Universitas	0.28726
Total	0.26186

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas

Tabel 4 Gini Ratio Menurut Tipe Daerah Tahun 2016

Tipe Daerah	Gini Ratio
Perkotaan	0.29434
Perdesaan	0.24636
Total	0.26969

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas

Tabel 5 Gini Ratio Penduduk 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Status Pekerjaan Dari Lapangan Usaha Utama Tahun 2016

Penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha	Gini Ratio
Berusaha sendiri	0.24059
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayari	0.22657
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	0.23496
Buruh/karyawan/pegawai	0.29667
Pekerja bebas	0.24907
Pekerja keluarga atau tidak dibayar	0.24477
Total	0.26186

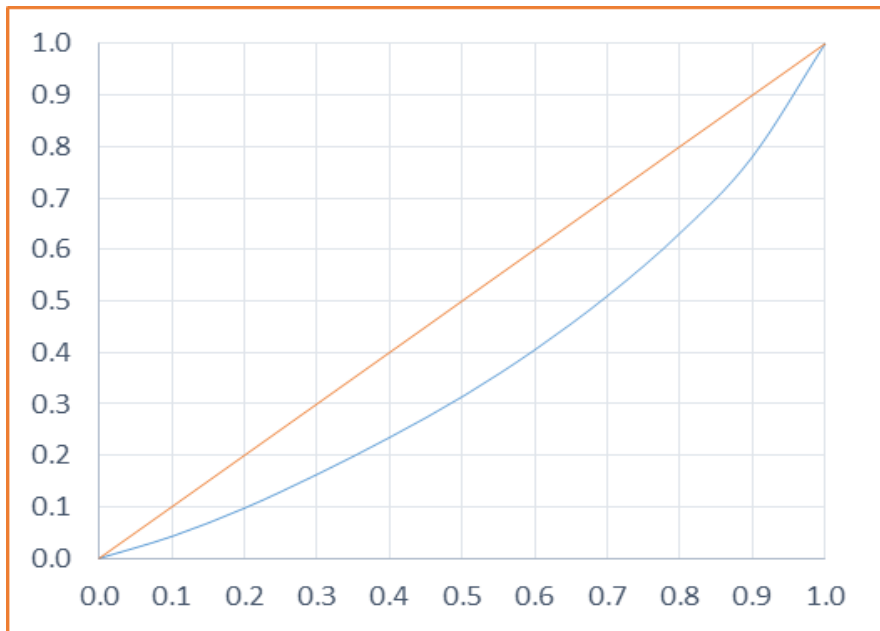
Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas

Tabel 6 Distribusi Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia

Kriteria Bank Dunia	Tahun 2016
40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	23.51
40% Penduduk Berpenghasilan Sedang	39.59
20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	36.89

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas

Gambar 2 Kurva Lorentz Gini Ratio Tahun 2016



Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas

Tabel 7 Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Perkotaan

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan	Perkotaan
< 150.000	0.00
150.000-199.999	0.00
200.000-299.999	0.00
300.000-499.999	11.61
500.000-749.999	19.62
750.000-999.999	13.26
1.000.000-1.499.999	20.76
1.500.000 ke atas	34.75
Total	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas

Tabel 8 Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Perdesaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan	Perdesaan
< 150.000	0.00
150.000-199.999	0.00
200.000-299.999	0.70
300.000-499.999	6.83
500.000-749.999	30.81
750.000-999.999	24.93
1.000.000-1.499.999	27.59
1.500.000 ke atas	9.15
Total	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas

Tabel 9 Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan	Perkotaan dan Perdesaan
< 150.000	0.00
150.000-199.999	0.00
200.000-299.999	.54
300.000-499.999	7.90
500.000-749.999	28.31
750.000-999.999	22.33
1.000.000-1.499.999	26.07
1.500.000 ke atas	14.85
Total	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas

Tabel 10 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengeluaran Makanan Per Kapita Sebulan	654,754	566,177	585,910
Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Sebulan	593,368	392,818	437,497
KAPITA	1,248,123	958,995	1,023,407

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Mas